

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2011.

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP.

Pada periode 2010-2014, BPPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Berdasarkan visi tersebut, misi yang diemban BPPSDMP adalah memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu, memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi, merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel, serta memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani, meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian, menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi, meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur

pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian, berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani, meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi: (1) pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (2) penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan; (3) pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian; (4) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri; (5) pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten; (6) peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian; (7) pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; (8) pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani**. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2011 meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem pelatihan pertanian, revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011, secara global bervariasi dari 85,17% sampai dengan 177,78%. dengan capaian rata-rata 99,05%. Sementara itu realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 mencapai 90,67% (Rp. 1.199.341.659.670) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000, atau termasuk kategori baik. Capaian pada tahun terakhir (2011) menunjukkan jarak yang tidak terlalu jauh antara realisasi terendah dengan realisasi tertinggi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2005.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 99,05% berbanding 91,58% sehingga diperoleh rasio output/input 1,08. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kategori efisien.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2011 meliputi terlambatnya penerbitan SK KPA Satker di daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan, kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksana belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di kabupaten/kota), masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011, terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan biaya sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama, terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, kurang seimbang antara peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan, serta sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian petugas atau pejabat di daerah.

Menyikapi kondisi permasalahan ada, langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas kepada seluruh Satker berdasarkan indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas kemampuan.

KATA PENGANTAR

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat BPPSDMP. Di tingkat operasional lapangan, BPPSDMP didukung oleh 2 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 35 Satker Dekonsentrasi dan 73 Satker Tugas Pembantuan.

Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPSDMP Tahun 2011. LAKIP BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPPSDMP selama tahun 2011.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2012

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS.
NIP. 19520202 197901 1001

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi dan Tata Kerja	3
D. Lingkungan Strategis Organisasi	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Stratejik	10
B. Rencana Kinerja Tahunan	18
C. Penetapan kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Hasil Pengukuran Kinerja	23
B. Penilaian Pencapaian Kinerja	25
C. Analisis Kinerja	26
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja	27
BAB IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis BPPSDMP Tahun 2010-2014	12
2. Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2011	18
3. Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011	21
4. Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2011	23
5. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2005-2011	27

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
1	Penetapan Kinerja tahun 2011	32
2	Struktur Organisasi BPPSDMP	33
3	Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2011	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2011.

B. Tugas dan Fungsi

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. Demikian pula dengan nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian.
2. Pusat Pelatihan Pertanian.
3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
4. Sekretariat BPPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Informasi dengan Subbidang: (1) Program dan Kerjasama; (2) Informasi dan Materi;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Penyuluhan; (2) Ketenagaan Penyuluhan;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Petani; (2) Usahatani;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Kelembagaan Pelatihan; (2) Ketenagaan Pelatihan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dengan Subbidang: (1) Sistem dan Metode; (2) Evaluasi Penyelenggaraan;

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
2. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian.
3. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama dengan Subbidang: (1) Program; (2) Kerjasama;
2. Bidang Pendidikan dengan Subbidang: (1) Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan;
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi dengan Subbidang: (1) Standardisasi Kompetensi; (2) Sertifikasi Profesi;

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas *memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP*. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian.
4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Struktur organisasi

Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Program dan Kerjasama; (2) Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta (3) Anggaran;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Perbendaharaan; (2) Akuntansi dan Verifikasi; serta (3) Perlengkapan;
3. Bagian Umum, dengan Subbagian-subbagian: (1) Hukum dan Organisasi; (2) Kepegawaian; dan (3) Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian-subbagian: (1) Evaluasi; (2) Pelaporan; dan (3) Hubungan Masyarakat; serta
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi BPPSDMP terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif, yaitu kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPPSDMP dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Kelembagaan BPPSDMP di Pusat yang terdiri dari 2 Satker (BPPSDMP dan FEATI Pusat) dan memiliki kepanjangan organisasi di daerah berupa 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 35 Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 73 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).
2. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, pada tahun 2011 BPPSDMP didukung oleh 2.492 orang aparat yang terdiri dari aparat yang bertugas di pusat 380 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 2.111 orang. Berdasarkan golongan jumlah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 199 orang golongan I; 743 orang golongan II; 1.215 orang golongan III dan 335 orang golongan IV. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan , adalah S3 47orang, S2 410 orang, S1/D4 864 orang, S0(D1-D3) 124 orang, SLTA 747 orang SLTP 115 orang dan SD 185 orang³. Dukungan sarana prasarana yang cukup memadai dan modern serta dukungan anggaran.

Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian yang dirasakan hingga saat ini meliputi:

1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas.

2. Belum optimalnya dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu peluang (*opportunities*) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, maupun penyuluhan pertanian di daerah milik petani yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM pertanian seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
2. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Honorer, Penyuluh Swadaya, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).
3. Dukungan atau *sharing* pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
4. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di wilayahnya.
5. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (FEATI, READ).

Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

1. Kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah, terutama dari segi pendidikan formal.
2. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian.

3. Lemahnya aksesibilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi.
4. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik (Renstra)

Rencana strategik BPPSDMP tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi

Visi BPPSDMP tahun 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi organisasi, BPPSDMP menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

- 2.1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.
- 2.2. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi.
- 2.3. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel.
- 2.4. Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah:

- 3.1. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani.
- 3.2. meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian.
- 3.3. Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi.
- 3.4. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah:

- 4.1. Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.
- 4.2. Meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian.
- 4.3. Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani.
- 4.4. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.
- 4.5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.

Rincian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BPPSDMP selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Sasaran BPPSDMP Tahun 2010-2014

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Outcome
1.	Tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya penyuluhan pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun. 2. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan rencana. 4. Terlegitimasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah. 5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Teraplikasikannya sistem informasi penyuluhan pertanian bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. 7. Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi. 8. Meningkatnya jejaring kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri. 9. Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian oleh 2.500 BPP. 10. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 11. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di 33 provinsi dan 250 kabupaten/kota, 3.000 kecamatan dan 28.304 desa. 12. Meningkatnya kinerja 24.608 THL-TBPP. 13. Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS. 14. Meningkatnya kompetensi dan kinerja 330 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta. 15. Tersedianya bahan masukan untuk pengambilan kebijakan penyuluhan pertanian.

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Outcome
		16. Meningkatnya kapasitas 28.304 Gapoktan. 17. Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan. 18. Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan. 19. Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada 3.000 kelompok. 20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani/Gapoktan di 68 kabupaten pada 18 provinsi sasaran FEATI.
2.	Meningkatnya kapasitas 108.855 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian. Serta Berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani	1. Meningkatnya kredibilitas 290 Widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan. 2. Meningkatnya kredibilitas 1.792 orang instruktur P4S. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan di 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah. 4. Meningkatnya kualitas 108.825 aparatur pertanian. 5. Meningkatnya kapasitas 97.814 petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis. 6. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pelatihan oleh 29 UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 14 program pelatihan pertanian sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. 8. Meningkatnya citra pemerintah RI di dunia internasional di bidang pelatihan pertanian. 9. Meningkatnya kredibilitas 29 kelembagaan pelatihan pertanian Pusat dan Daerah. 10. Meningkatnya kredibilitas 891 kelembagaan P4S. 11. Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 150 desa pada 5 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah
4.	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	1. Terselenggaranya pendidikan tinggi kedinasan di 7 STPP yang akuntabel dan sesuai standar nasional pendidikan. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat fungsional RIHP dan Karantina yang kompeten. 3. Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 7 STPP. 4. Meningkatnya profesionalisme 210 Dosen STPP.

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Outcome
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya kualifikasi 2.500 orang aparatur pertanian di bidang RIHP dan perkarantinaan pertanian. 6. Meningkatnya kualifikasi pendidikan dan kinerja 1.000 aparatur pertanian. 7. Meningkatnya kualitas program pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. 8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. 9. Terlaksananya sertifikasi bagi 5.000 penyuluh pertanian dan 750 non-penyuluh pertanian. 10. Meningkatnya kualitas 300 Aessor kompetensi bidang pertanian. 11. Terselenggaranya diklat profesi di 10 Lembaga Diklat Profesi (LDP). 12. Terselenggaranya uji kompetensi di 10 Tempat Uji Kompetensi (TUK). 13. Terselenggaranya sertifikasi profesi bidang pertanian untuk 30 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 14. Meningkatnya profesionalisme 300 orang Guru dan 150 orang tenaga kependidikan SMK-PP 15. Meningkatnya kualitas program pendidikan menengah pertanian. 16. Terselenggaranya pendidikan di 71 unit SMK-PP sesuai standar nasional pendidikan. 17. Meningkatnya kualitas lulusan dari 71 SMK-PP. 18. Menguatnya eksistensi 71 unit SMK-PP. 19. Tersedianya 70.000 tenaga kerja bidang pertanian yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan muda pertanian.
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja BPPSDMP (Pusat) dan 19 UPT Pusat di bidang pelayanan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan. 2. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kegiatan BPPSDMP. 3. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan BPPSDMP. 4. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP. 5. Meningkatnya pelayanan kehumasan untuk membangun citra positif BPPSDMP

5. Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, maka kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi:

- 5.1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- 5.2. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan.
- 5.3. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian.
- 5.4. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri.
- 5.5. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten.
- 5.6. Peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian.
- 5.7. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten.
- 5.8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014 adalah:

- 5.1. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.
- 5.2. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
- 5.3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta.
- 5.4. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdaya saing.
- 5.5. Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TBPP.
- 5.6. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel.
- 5.7. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non-aparatur pertanian.
- 5.8. Peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kelembagaan pelatihan pertanian.
- 5.9. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani (P4S).
- 5.10. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian.
- 5.11. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- 5.12. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian.
- 5.13. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.
- 5.14. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pertanian.

- 5.15. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian.
- 5.16. Pemantapan sistem perencanaan.
- 5.17. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
- 5.18. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

6. Program dan Kegiatan

Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah ***Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani***. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2011 meliputi kegiatan-kegiatan:

- 6.1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, terdiri dari pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani serta P3TIP/FEATI.
- 6.2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, terdiri dari pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian; serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan (*Rural Empowerment and Agricultural Development/READ*).
- 6.3. Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, terdiri dari peningkatan kualitas kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

6.4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, terdiri dari pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; serta pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPSDMP untuk tahun 2011 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BPPSDMP Tahun 2011

Unit Eselon I : BPPSDMP
Tahun : 2011

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
1. Tumbuhkembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.	1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota	494 Unit
	2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.	32.000 Unit
	3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.	36.000 Orang
	4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.	9 Judul
	5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.	4 Dokumen
	6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .	3.080 Desa
	7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).	108 Unit
	8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.	217 Unit

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non- aparatur pertanian, serta Berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya.	17.370 Orang
	2. Jumlah non-aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya	19.080 Orang
	3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kapasitas dan kompetensinya.	768 Orang
	4. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya.	30 Desa
	5. Jumlah NSPK pelatihan pertanian yang tersosialisasi.	30 Dokumen
	6. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang berkembang.	10 Unit
	7. Jumlah P4S yang berkembang.	170 Unit
3. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kualifikasi pendidikannya	100 Orang
	2. Jumlah tenaga fungsional yang meningkat kualifikasi pendidikannya.	350 Orang
	3. Jumlah kelembagaan pendidikan pertanian yang berkembang.	8 Unit
	4. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang meningkat kompetensinya	145 Orang
	5. Jumlah profesi bidang pertanian yang terstandarisasi.	6 Profesi
	6. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi.	600 Orang
	7. Jumlah NSPK pendidikan pertanian yang tersosialisasi.	27 Dokumen
	8. Jumlah tenaga kerja menengah siap pakai dan calon wirausahawan muda	10.000 Orang

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	1. Jumlah NSPK yang tersosialisasi.	18 Dokumen
	2. Jumlah bulan pelayanan perkantoran	12 Bulan

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) BPPSDMP untuk tahun 2011 merupakan tindak lanjut rencana kinerja tahunan yang telah mendapatkan anggaran dalam DIPA. Pada tahun 2011, terjadi kesesuaian antara RKT dengan Penetapan Kinerja BPPSDMP karena seluruh kegiatan yang tertuang dalam RKT memperoleh alokasi anggaran dalam DIPA, Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011 disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penetapan Kinerja BPPSDMP Tahun 2011

Unit Eselon I : BPPSDMP

Tahun : 2011

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
1. Tumbuhkembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.	1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota	494 Unit
	2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.	32.000 Unit
	3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.	36.000 Orang
	4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.	9 Judul
	5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.	4 Dokumen
	6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .	3.080 Desa
	7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).	108 Unit
	8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.	217 Unit
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non- aparatur pertanian, serta berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya.	17.370 Orang
	2. Jumlah non-aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya	19.080 Orang
	3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kapasitas dan kompetensinya.	768 Orang
	4. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya.	30 Desa
	5. Jumlah NSPK pelatihan pertanian yang tersosialisasi.	30 Dokumen
	6. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang berkembang.	10 Unit
	6. Jumlah P4S yang berkembang.	170 Unit

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
3. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan aparatur pertanian, non-aparatur pertanian dan tersertifikasinya SDM pertanian.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kualifikasi pendidikannya	100 Orang
	2. Jumlah tenaga fungsional yang meningkat kualifikasi pendidikannya.	350 Orang
	3. Jumlah kelembagaan pendidikan pertanian yang berkembang.	8 Unit
	4. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang meningkat kompetensinya	145 Orang
	5. Jumlah profesi bidang pertanian yang terstandarisasi.	6 Profesi
	6. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi.	600 Orang
	7. Jumlah NSPK pendidikan pertanian yang tersosialisasi.	27 Dokumen
	8. Jumlah tenaga kerja menengah siap pakai dan calon wirausahawan muda	10.000 Orang
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.	1. Jumlah NSPK yang tersosialisasi.	18 Dokumen
	2. Jumlah bulan pelayanan perkantoran	12 Bulan

Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2011: Rp. 1.320.518.142.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BPPSDMP pada tahun 2011 disajikan pada tabel 4, sebagai berikut:.

**Tabel 4.
Hasil Pengukuran Kinerja BPPSDMP Tahun 2011**

Unit Eselon I : PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BPPSDMP
Tahun : 2011

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	%
1. Tumbuh-kembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.	1. Berfungsinya kelembagaan penyuluhan pertanian dan terselenggaranya penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota	494 Unit	568 Unit	114,98
	2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian oleh Gapoktan.	32.000 Unit	33.488 Unit	104,65
	3. Terlaksananya operasional penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP.	36.000 Org.	51.117 Org.	142,16
	4. Terdiseminasinya materi penyuluhan pertanian.	9 Judul	16 Judul	177,78
	5. Tersosialisasinya NSPK penyuluhan pertanian.	4 Dok.	4 Dok.	100,00
	6. Berkembangnya FMA di perdesaan lokasi FEATI .	3.080 Desa	2.774 Desa	90,60
	7. Pembangunan/rehab BPP (FEATI).	108 Unit	101 Unit	93,52
	8. Meningkatnya pelayanan penyuluhan oleh BPP.	217 Unit	205	94,47

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	%
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non- aparatur pertanian, serta Berkembang-nya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani.	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya.	17.370 Org.	23.875 Org.	137,45
	2. Jumlah non-aparatur pertanian yang meningkat kinerjanya	19.080 Org.	20.965 Org.	109,88
	3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kapasitas dan kompetensinya.	768 Org.	778 Org.	101,30
	4. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya.	30 Desa	50 Desa	166,67
	5. Jumlah NSPK pelatihan pertanian yang tersosialisasi.	30 Dokumen	30 Dok.	100,00
	6. Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang berkembang.	10 Unit	10 Unit	100,00
3. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan aparatur pertanian, non- aparatur pertanian dan tersertifikasinya SDM pertanian.	6. Jumlah P4S yang berkembang	170 Unit	142 Unit	83,53
	1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kualifikasi pendidikannya	100 Org.	124 Org.	124,00
	2. Jumlah tenaga fungsional yang meningkat kualifikasi pendidikannya.	350 Org.	434 Org.	124,00
	3. Jumlah kelembagaan pendidikan pertanian yang berkembang.	8 Unit	9 Unit	112,50
	4. Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian yang meningkat kompetensinya	145 Org.	145 Org.	100,00
	5. Jumlah profesi bidang pertanian yang terstandarisasi.	6 Profesi	7 Profesi	116,67
	6. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi.	600 Org.	600 Org.	100,00
	7. Jumlah NSPK pendidikan pertanian yang tersosialisasi.	18 Dokumen	22 Dok	114,82
8. Jumlah tenaga kerja menengah siap pakai dan calon wirausahawan muda	10.000 Org.	10.595	105,95	
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis dalam mendukung terwujudnya laporan SAI BPPSDMP yang akuntabel.	1. Jumlah NSPK yang tersosialisasi.	18 Dokumen	22 Dok.	122,22
	2. Jumlah bulan pelayanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00

Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2011: Rp. 1.320.518.142.000

Realisasi Anggaran TA 2011 : **Rp. 1.197.341.659.670 (90,67%)**.

B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011, secara global tampak bervariasi dari 85,17% (fasilitasi kelembagaan pelatihan petani P4S) sampai dengan 177,78% (penyusunan dan diseminasi materi penyuluhan pertanian) dengan capaian rata-rata 99,05% atau hampir mencapai target sempurna 100%. Berdasarkan 5 sasaran strategis, yakni: (1) tumbuhkembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani; (2) meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian; (3) berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani; (4) meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan aparatur pertanian, non-aparatur pertanian dan tersertifikasinya SDM pertanian; serta (5) meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis dalam mendukung terwujudnya laporan SAI BPPSDMP yang akuntabel, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhkembangnya kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani berkisar antara 90,60% sampai dengan 177,78%.
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian berkisar antara 100% sampai dengan 166,67%.
3. Berkembangnya kelembagaan pelatihan pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani berkisar antara 83,17% sampai dengan 100%.

4. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan aparatur pertanian, non-aparatur pertanian dan tersertifikasinya SDM pertanian berkisar antara 100% sampai dengan 124%.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis dalam mendukung terwujudnya laporan SAI BPPSDMP yang akuntabel sebesar 100%.

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 pada umumnya tidak mencapai target optimal 100%. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercapainya target-target fisik pada beberapa kegiatan sehingga hal tersebut berpengaruh kepada realisasi serapan anggaran yang tidak mencapai target pula. Namun secara totalitas, tingkat realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 90,67% (Rp. 1.199.341.659.670) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000, termasuk kategori baik.

C. Analisis Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2008 tercatat berkisar antara 0,00%-100% dan pada tahun 2009 berkisar antara 0,00%-113,16%. Pada tahun 2010, nilai pencapaian kinerja sasaran kegiatan BPPSDMP tersebut mencapai kisaran 0%-530,67% dan pada tahun 2011 mencapai kisaran 85,17% sampai dengan 177,78%. Capaian pada tahun terakhir (2011) menunjukkan jarak yang tidak terlalu jauh antara realisasi terendah dengan realisasi tertinggi. Hal ini mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam arti kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar.

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 90,67%, yaitu sebesar Rp. Rp. 1.199.341.659.670 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 tampak lebih baik dan merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2005. Perkembangan realisasi serapan anggaran BPPSDMP selama 7 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif seperti tampak pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP
Tahun 2005-2011

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2005	381.476.823.000	233.447.806.000	61,20
2006	670.872.803.000	547.095.346.000	81,55
2007	342.968.900.000	273.551.994.355	79,76
2008	940.068.111.000	780.633.105.000	83,04
2009	1.237.774.000.000	1.072.838.080.000	86,67
2010	1.247.591.158.000	1.090.519.431.208	87,41
2011	1.320.518.142.000	1.199.341.659.670	90,67

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 99,05% berbanding 85,17%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kedalam kategori efisien.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2011 meliputi:

1. Terlambatnya penerbitan SK KPA Satker di daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.
2. Kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksana belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di kabupaten/kota).
3. Masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011.
4. Terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan biaya sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama.
5. Terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
6. Kurang seimbang antara peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan.
7. Sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian petugas atau pejabat di daerah.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem *reward and punishment yang* tegas kepada seluruh Satker berdasarkan indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas kemampuan.



BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban BPPSDMP selama tahun 2011. Pada tahun 2011, sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam 5 sasaran strategis yang dipayungi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2011 secara global mencapai 99,05% dengan kisaran 85,17% sampai dengan 177,78%.. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 90,67%, atau sebesar Rp. 1.199.341.659.670 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.518.142.000.

Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja BPPSDMP pada tahun 2011 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,09. Disisi lain capaian realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2011 sebesar 90,67% merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2011 adalah terlambatnya penerbitan SK KPA Satker di daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga awal pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan, kuantitas/Jumlah maupun kualitas SDM pelaksana belum memadai, khususnya di daerah (Satker Dekonsentrasi di provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di kabupaten/kota), masih terjadinya revisi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2011, terjadinya klaim aset oleh masyarakat yang memerlukan

biaya sertifikasi cukup tinggi dan melalui proses yang cukup lama, terdapat wilayah kerja yang masih sulit dijangkau oleh alat transportasi darat sehingga memerlukan sarana transportasi udara yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, kurang seimbang antara peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki Satker dengan peningkatan penyelenggaraan kegiatan, serta sering terlambatnya pengumpulan data karena adanya perubahan kode Satker serta sering terjadinya pergantian petugas atau pejabat di daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah: segera menyusun jadwal palang secara lebih cermat setelah DIPA terbit, menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait guna mempercepat penyelesaian kegiatan, menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi, meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan di lingkup BPPSDMP, penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu, penerapan sistem *reward and punishment* yang tegas, dan meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan.

Penetapan Kinerja tahun 2011

Struktur Organisasi BPPSDMP

Data Pegawai BPPSDMP Tahun 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 TAHUN 2010

